

ABSTRAK

KONSTRUKSI PENGATURAN PRODUK *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* SEBAGAI HASIL KARYA INTELEKTUAL BERDASARKAN REZIM TRIPS

Oleh

MUHAMMAD FEBRIYAN SAPUTRA

Revolusi Industri 5.0 mempengaruhi dinamika masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi canggih yang terintegrasi oleh kecerdasan manusia seperti *artificial intelligence*. Seringnya penggunaan teknologi AI dalam kehidupan manusia mengakibatkan permasalahan hukum. Namun, perjanjian TRIPs atau regulasi nasional seperti di Indonesia belum mengatur secara spesifik terkait dengan *artificial intelligence*. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk (1) menganalisis kedudukan hasil karya *artificial intelligence* berdasarkan rezim TRIPs dan (2) menganalisis konstruksi pengaturan produk *artificial intelligence* sebagai hasil karya intelektual berdasarkan rezim TRIPs. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengolahan data penelitian menggunakan teknik studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hasil karya *artificial intelligence* berdasarkan rezim TRIPs bukanlah sebagai subjek hukum, melainkan hanya objek. Namun, kedudukan AI dapat disamakan dengan badan hukum dikarenakan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum. Konstruksi pengaturan produk *artificial intelligence* sebagai hasil karya intelektual berdasarkan rezim TRIPs diperlukan seiring berkembangnya teknologi dengan menggunakan prinsip *No Ownership* terhadap hasil karya kecerdasan buatan dan menjadikannya sebagai milik publik. Upaya tersebut merupakan cara terbaik agar pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh kecerdasan buatan yang syarat dengan isu komersialisasi tidak berjalan di atas kekosongan hukum.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence*; Hak Kekayaan Intelektual; Konstruksi Hukum; Perjanjian TRIPs.

ABSTRACT

CONSTRUCTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE PRODUCTS AS A INTELLECTUAL WORK BASED ON THE TRIPS REGIME

By

MUHAMMAD FEBRIYAN SAPUTRA

The Industrial Revolution 5.0 influences the dynamics of society in adapting to advanced technology that is integrated with human intelligence such as artificial intelligence. The frequent use of AI technology in human life results in legal problems. However, neither the TRIPs agreement nor national regulations such as in Indonesia specifically regulate artificial intelligence. Therefore, the research aims to (1) analyze the position of artificial intelligence works based on the TRIPs regime and (2) analyze the regulatory construction of artificial intelligence products as intellectual works based on the TRIPs regime. This type of research is normative research carried out by examining library materials. The research uses a statutory approach. The data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Processing research data uses library study techniques.

The research results show that the position of artificial intelligence work based on the TRIPs regime is not as a legal subject, but only as an object. However, AI's position can be equated with a legal entity due to its ability to carry out legal actions. Construction of artificial intelligence products regulation as intellectual work based on the TRIPs regime is very necessary as technology develops by using the No Ownership principle of artificial intelligence work results and making them public property. This effort is the best way to ensure that violations of intellectual property rights by artificial intelligence, which are conditional on commercialization issues, do not operate in a legal vacuum.

Keywords: *Artificial Intelligence; Intellectual Property Rights; Legal Construction; TRIPs Agreement.*